



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

CASCADING PROGRAM
DAN KEGIATAN
DPMPTSP

2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

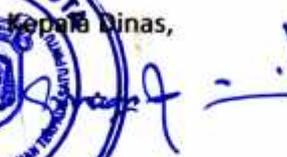
ALAMAT : JALAN PAHLAWAN No.1 RT 34 GEDUNG MPP SAMARINDA 75123 Telp. (0541) 739614, FAX (0541) 741286
SMS CENTER 082152246964 EMAIL : dpmptsp.smd@gmail.com WEBSITE : dpmptsp.samarindakota.go.id/
mpp.samarindakota.go.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Cascading program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda berpedoman pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, sekaligus mengukur perkembangan data perangkat daerah, tingkat pengukuran data, sampai kelengkapan dokumen, kelengkapan isi dokumen dan sinkronisasi antar dokumen.

Secara substantif penyusunan Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda merupakan sarana penjenjangan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Kepala Daerah, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Governance.

Akhirnya semoga Dokumen Cascading program dan Kegiatan Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan dan menjadi pedoman pelaksanaan program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Samarinda. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Dokumen Cascading program dan Kegiatan ini.

Samarinda, 21 Februari 2023
Kepala Dinas,

Jusmaramdhana Alus., SH., M.Si
NIP. 19711030 199403 1 002

**CASCADING VISI DAN MISI WALIKOTA DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

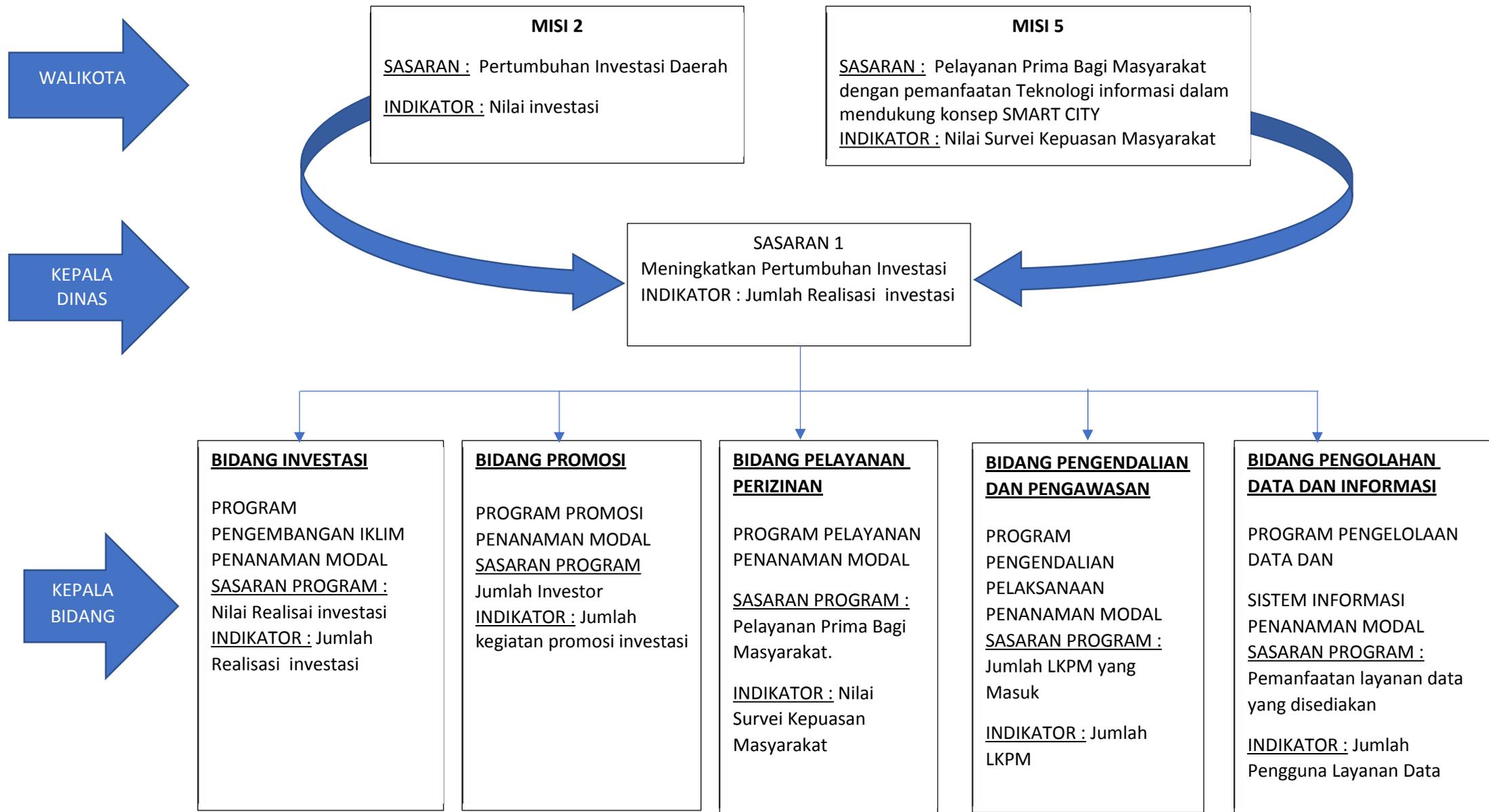
Visi walikota

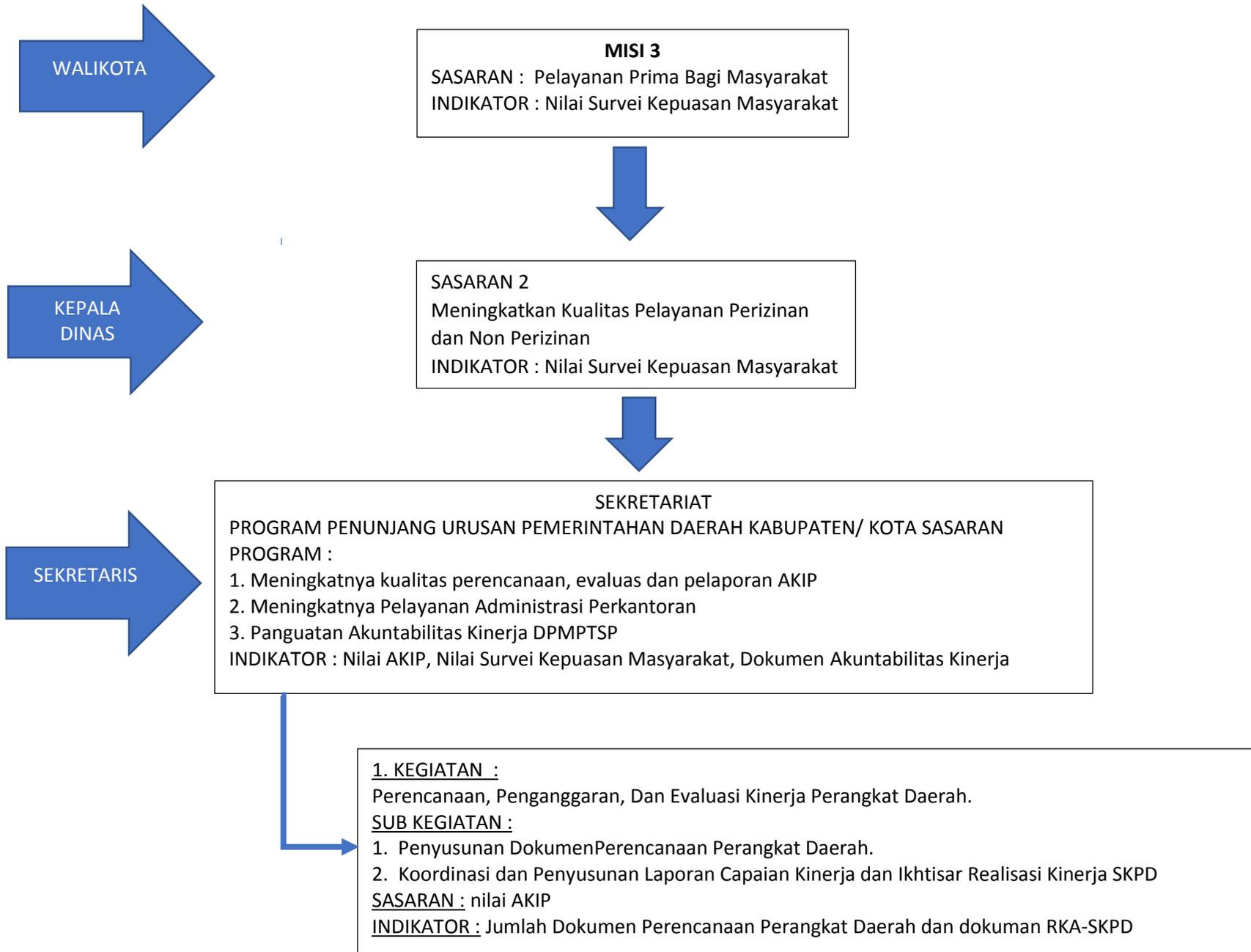
TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN.

Misi walikota

1. Mewujudkan masyarakat madani (civil society) ditopong dengan sumberdaya manusia unggul, sehat jasmani dan rohani dalam kehidupan yang harmonis, egaliter serta relasi yang seimbang antar tiga pilar (masyarakat, negara dan swasta).
2. **Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan PAD, berkurangnya angka pengangguran, berkembangnya sector riil di luar pertambangan, munculnya ekonomi kreatif, start up dan market place di era revolusi industry 4.0**
3. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan.**
4. Mewujudkan masyarakat religius, mengedepankan nilai-nilai agama dan memegang teguh tradisi dan adat istiadat sebagai warisan leluhur dan identitas bangsa.
5. **Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, modern, nyaman dan ramah lingkungan dalam konsep SMART CITY yang dicirikan pemanfaatan teknologi informasi.**

Yang menjadi fokus DPMPTSP Kota Samarinda adalah misi ke-2 misi ke-3 dan misi ke-5.





2. KEGIATAN :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

SASARAN : Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

INDIKATOR : Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN yang di bayarkan, Jumlah Laporan Keuangan

3. KEGIATAN :

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN :

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

SASARAN : Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor.

INDIKATOR : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

4. KEGIATAN :

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN :

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

SASARAN : Laporan jumlah pegawai yang disediakan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

INDIKATOR : Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya

5. KEGIATAN :

Administrasi Umum Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

SASARAN : Laporan penyediaan administrasi Umum Kantor

INDIKATOR : Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, Jumlah bahan logistik, Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan, Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Jumlah Rombongan Tamu Yang Berkunjung.

6. KEGIATAN :

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

SUB KEGIATAN :

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Pengadaan Mebel.
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

SASARAN : Laporan Rencana Kebutuhan Barang.

INDIKATOR : Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan, Jumlah Mebel, dan Jumlah Peralatan dan Mesin

7. KEGIATAN :

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SUB KEGIATAN :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

SASARAN : Laporan Penyediaan Jasa.

INDIKATOR : Tagihan Rekening yang di bayarkan, Jumlah Tagihan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jumlah tagihan Jasa Pelayanan Umum

8. KEGIATAN :

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SUB KEGIATAN :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

SASARAN : Laporan Pemeliharaan.

INDIKATOR : Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan kendaraan operasional, Jumlah Pemeliharaan peralatan dan Mesin, dan Jumlah Gedung Milik Sendiri/Sewa yang terpelihara.

TUJUAN

IKU KEPALA DAERAH

IKU KEPALA DPMPTSP

PROGRAM DPMPTSP

KEGIATAN DPMPTSP

SUB KEGIATAN DPMPTSP

Terciptanya
Pertumbuhan dan
Pemerataan
Ekonomi
**IK:
PERTUMBUHAN
EKONOMI**

Meningkatnya
Nilai Investasi
IK: NILAI INVESTASI

Meningkatnya
Jumlah Realisasi
Investasi
**IK: JUMLAH
REALISASI
INVESTASI**

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL
**IK: JUMLAH REGULASI YANG MENDUKUNG
INVESTASI**

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
IK: Jumlah PERDA

Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan Penanaman Modal
**IK: Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal
**IK: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh
Insentif dan Kemudahan Berusaha**

Pembuatan Peta Potensi Investasi
Kabupaten/ Kota
IK: Jumlah Dokumen

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota
IK: Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
IK: Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
IK: JUMLAH INVESTOR

Penyelenggaraan Promosi Penanaman
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
IK: Jumlah Promosi yang diselenggarakan

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
**IK: Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman
Modal Kewenangan Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota
IK: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN
MODAL
**IK: NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN**

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
secara Terpadu Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
**IK: Jumlah Pelaku Usaha yang patuh
terhadap kewajiban Perizinan Berusaha**

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
**IK: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal
**IK: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan Penanaman Modal**

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
**IK: Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan
Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan**

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif
Daerah
IK: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
**IK: JUMLAH PELAKU USAHA YANG
MELAPOR LKPM**

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
IK: Jumlah Laporan Pengendalian

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
**IK: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman**

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
**IK: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal**

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman
Modal
IK: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
IK: JUMLAH PENGGUNA LAYANAN DATA

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan
dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
IK: Jumlah sistem Aplikasi

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan
dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
**IK: umlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan**